

Kajian Hukum Energi Baru Terbarukan Sumber Daya Air  
Dalam Pembangunan PLTA Yang Kepemilikan Mayoritasnya  
Swasta (Studi Kasus Pembangunan PLTA Batang Toru  
Kabupaten Tapanuli Selatan = Legal Studies on New Renewable  
Energy Water Resources in the Development of Hydropower Plants  
with Majority Private Ownership (Case Study of the Development of  
the Batang Toru Hydropower Plant, South Tapanuli Regency)

Rumahorbo, Rony Parulian, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=9999920531095&lokasi=lokal>

---

Abstrak

Tingginya kebutuhan listrik pada masyarakat untuk pemenuhannya membutuhkan sumber daya air, dikarenakan air di Indonesia sangat melimpah. Namun dalam pelaksanaannya perlu pengaturan terhadap pengembangan pembangkit listrik tenaga air (PLTA) yang masuk ke dalam energi baru terbarukan (EBT). Adapun kondisi pemerintah yang masih terbatas sehingga dibutuhkan kerjasama antara pemerintah dengan swasta. Wawasan lingkungan sering kali dilanggar oleh swasta/PLTA dan dapat berpotensi menimbulkan permasalahan dalam ketersediaan sumber daya air untuk masyarakat. Jadi oleh karena itu perlu dilihat bagaimana jalan keluar yang harus dibuat oleh pemerintah. Pembahasan permasalahan dalam penelitian ini yakni: pertama, pengaturan pemanfaatan energi baru terbarukan sumber daya air dalam pembangunan PLTA Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan. Kedua, pemanfaatan air sebagai energi baru terbarukan dan dampaknya bagi masyarakat dalam pembangunan PLTA Batang Toru yang kepemilikan mayoritasnya swasta. Dalam penelitian ini metode yang digunakan yakni doktrinal. Penelitian doktrinal menggunakan data sekunder sebagai data dasar dengan melakukan penelitian dan di dukung oleh data primer melalui wawancara kepada pihak terkait. Penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam perkembangan regulasi EBT SDA di Indonesia dan Daerah belum sepenuhnya diatur, serta berorientasi pada aspek kemanfaatan EBT. Regulasi yang memengaruhi pelaksanaan EBT perlu disesuaikan dan diubah sehingga dapat meningkatkan pemanfaatan EBT, khususnya PLTA sebagai penghasil listrik yang berasal dari air. Listrik dan air adalah cabang produksi yang menyangkut hajat hidup orang banyak, oleh karena itu kekayaan alam harus dikuasai oleh negara sesuai dengan Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Adapun saran yang ditawarkan dari hasil penelitian ini adalah perlu meninjau kembali terkait aspek keekonomian pada sektor EBT, perlu dilakukan peninjauan kembali terhadap kontrak-kontrak PT PLN – IPP, pemerintah perlu dengan cermat melihat dampak pembangunan PLTA bagi masyarakat dalam serta menyoroti kepemilikan mayoritas cabang produksi yang menyangkut hidup orang banyak.

.....The high demand for electricity in society to fulfill it requires water resources, because water in Indonesia is very abundant. However, in practice it is necessary to regulate the development of hydroelectric power plants (PLTA) which are included in the new renewable energy (EBT). The condition of the government is still limited so that cooperation between the government and the private sector is needed. Environmental awareness is often violated by the private sector/PLTA and can potentially cause problems in the availability of water resources for the community. So therefore it is necessary to see how the solution must be made by the government. The discussion of the problems in this study are: first, regulation of the utilization of new renewable energy in water resources in the construction of the Batang Toru hydropower

plant, South Tapanuli Regency. Second, the use of water as a new renewable energy and its impact on the community in the construction of the Batang Toru hydropower plant, which is majority owned by the private sector. In this study the method used is doctrinal. Doctrinal research uses secondary data as basic data by conducting research and is supported by primary data through interviews with related parties. This study concludes that in the development of regulations on Natural Resources EBT in Indonesia and the Regions it has not been fully regulated, and is oriented towards aspects of the benefits of EBT. Regulations that affect the implementation of EBT need to be adjusted and changed so as to increase the utilization of EBT, especially hydropower as a producer of electricity derived from water. Electricity and water are branches of production that concern the livelihoods of many people, therefore natural resources must be controlled by the state in accordance with Article 33 paragraph 3 of the 1945 Constitution. The suggestions offered from the results of this study are that it is necessary to review the economic aspects of the EBT sector, it is necessary to review PT PLN - IPP contracts, the government needs to carefully look at the impact of hydropower development on the community and highlight the ownership of the majority of production branches which concern the lives of many people.